

Hukuman Kebiri Perl

Oleh Dr Nispul Khoiri, MA

Hukuman kebiri bukanlah hal baru, hukuman kebiri juga pernah diberlakukan oleh beberapa negara seperti China, Korea Selatan, Polandia, Inggris, Republik Ceko, Jerman dan Inggris

Kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak dan perempuan tidak akan pernah berhenti, selama lemahnya perlindungan negara. Peristiwa tragis ini kembali terjadi kepada Yuyun (YY) (April 2016 di Bengkulu). Siswi 14 tahun ini meninggal setelah diperkosa dan dibunuh oleh 14 orang pelaku kemudian jenazahnya dibuang ke jurang. Peristiwa ini tidak saja tragis tetapi juga biadab terjadi di luar kenormalan kemanusiaan dan agama terlebih para pelaku diduga masih di bawah umur.

Pemerkosaan dan pembunuhan YY harus menjadi simbol perlawanan terhadap struktur sosial patriarki di negeri ini. Kasus YY adalah segelintir kasus yang terangkat ke permukaan seperti puncak gunung es, masih banyak YY lain belum tersentuh hukum. Berdasarkan satu data, tercatat kekerasan seksual dalam rumah tangga tahun 2015 sebanyak 2.274 kasus dan kekerasan seksual dalam komunitas 2.183 kasus. Artinya kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan jenis kejahatan terbanyak dibanding kekerasan psikis, ekonomi, fisik dan lainnya.

Harus diakui terbukanya ruang kejahatan seksual juga tidak terlepas dari faktor adanya perilaku subordinasi dan relasi tidak setara laki-laki dan perempuan. Pada aspek lain cara berpakaian ataupun tingkah laku wanita juga dapat mengundang potensi kekerasan seksual. Namun jika realitas ini dibiarkan begitu saja, tanpa ada berbagai upaya pencegahan dan perlindungan. Maka perempuan dan anak akan selalu menjadi korban baik di ruang publik maupun ruang pribadi. Bahkan ruang pribadi sekalipun justru bukan lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman.

Perspektif Hukuman Kebiri

Adanya wacana memasukkan hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUUPKS). Kemudian disikapi secara kontroversi setuju dan tidak setuju—ini pantas menjadi perhatian serius dan didiskusikan. Hukuman kebiri (kastrasi) selalu didefinisikan sebagai tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia bertujuan menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Di kalangan medis berkembang kebiri dapat dilakukan dua cara yakni melalui kebiri fisik memotong secara utuh dan kebiri kimia menyuntikkan hormon untuk mematikan hormon testosteron yang ada di testis laki-laki.

Persoalannya apakah hukuman kebiri merupakan upaya efektif untuk pencegahan kejahatan seksual, paling tidak analisis ini dapat dilihat dalam beberapa pemikiran. *Pertama*, kebiri harus disetarakan sebagai salah bentuk hukuman berat karena kebiri memandulkan pelaku kejahatan yang memberikan efek permanen kepada fisik dan psikis pelaku. Berbeda halnya hukuman penjara sekalipun seumur hidup—selama ini sebagai salah satu hukuman berat—namun dengan adanya

pengampunan—pengurangan (seperti remisi, dll) penjara menjadi hal biasa karena potensi ruang kebebasan tetap terbuka.

Kedua, secara psikologi kejahatan seksual juga terkait kejiwaan, sudah pasti kejahatan ini berpotensi dilakukan secara berulang oleh pelakunya, maka perempuan dan anak akan selalu siap dimangsa. Jika kebiri diberlakukan akan turut meminimalisir kejahatan tersebut.

Ketiga, hukuman kebiri tidak saja memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memberikan tekanan kepada keluarga pelaku itu sendiri oleh lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Ini berbeda dengan kecaman hukuman penjara yang sifatnya temporal seiring waktu kurungan yang dijalani, apalagi kebebasan seseorang dari penjara dianggap final setelah menebus hukuman masalalahnya dan mudah diterima masyarakat.

Keempat, jika selama ini ada kekhawatiran terhadap hukuman kebiri menjadi satu-satunya pilihan bagi pelaku kejahatan seksual dibanding pilihan penjara. Maka sesungguhnya efek kebiri secara fisik dan psikis lebih berbahaya dan memberikan penderitaan panjang bila dibandingkan hukuman penjara. *Kelima*, hukuman kebiri sebagai hukuman baru memberikan keadilan bagi korban apalagi dintegrasikan dengan hukuman kurungan dengan melihat kuantitas dan kualitas kejahatan seksual yang dilakukan.

Hukuman kebiri bukanlah hal baru, hukuman kebiri juga pernah diberlakukan oleh beberapa negara. Kekaisaran China masa silam menerapkan hukuman kebiri kepada laki-laki di lingkungan para isteri dan putri raja—meskipun karena faktor profesi bukan karena melakukan kejahatan seksual. Kebijakan ini dipandang efektif sebagai upaya perlindungan kaisar kepada perempuan dari laki-laki terdekat di sekitarnya. Kemudian hukuman kebiri juga pernah dan diterapkan di sejumlah negara modern, seperti Korea Selatan negara pertama di Asia memberlakukan kebiri kepada pelaku paedofil. Di Eropa seperti Polandia, Inggris, Republik Ceko, Jerman dan Inggris juga menerapkan hukuman kebiri terhadap pelaku seksual. Meskipun dikritik oleh Dewan Eropa dengan alasan HAM, namun hukuman ini telah efektif menurunkan angka kejahatan seksual.

Begitu pula konteks hukum pidana Islam, meskipun tidak mengatur tentang hukuman kebiri secara langsung. Tetapi dengan adanya pengaturan hukuman *takzir*, yakni hukuman *ta'adib* yang memberikan pendidikan (kedisiplinan) dari hukuman ringan sampai kepada yang seberat-beratnya. Maka pemerintah ataupun hakim berperan penting menetapkan hukum sesuai kategori *takzir* (Abdul Qadir Audah: *at-Tasyri' al-Jana' al-Islamiyy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*). Dalam konteks kebiri dapat dikelompokkan sebagai hukuman *takzir*, karena tujuan diterapkannya sebuah hukuman adalah memberikan kemashalatan manusia. Artinya kembali kepada restorasi pemerintah untuk memberlakukan hukuman kebiri. Jika menurut pemerintah



dan masyarakat hukuman kebiri sudah saatnya diberlakukan, maka ini harus dipandang sebagai salah satu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Kehadiran Negara

Terkuaknya kembali kejahatan seksual sebagaimana terjadi pada YY, dapat dijadikan momentum bagi pemerintah (eksekutif-legislatif) untuk mengesahkan percepatan RUUPKS. Kekerasan seksual tidak bisa ditawar lagi sebagai kebutuhan hukum *dharuri* yang harus diperhatikan. Maka upaya memasukkan hukuman kebiri menjadi penting dalam RUUPKS, merupakan bentuk kehadiran negara terhadap perlindungan wanita dan anak dari kesemenamenaan perilaku kejahatan seksual. Kemudian kehadiran negara akan dirasakan jika negara dapat menjamin pencegahan, penanganan, perlindungan, pengadilan dan pemulihan bagi korban.

Selain itu kebiri sebagai hukuman baru akan semakin lebih efektif jika didukung upaya lain bersifat integratif. Apalagi motif kejahatan seksual tidak hanya didasarkan perilaku kriminal pelaku, tetapi faktor lain seperti cara